



TUDUHAN NEPOTISME SEBAGAI FAKTOR PEMICU PEMBERONTAKAN TERHADAP UTSMAN BIN AFFAN

Fathia Saidah Fahriah¹, Arwan²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2}

e-mail: 22490125255@students.uin-suska.ac.id¹, arwan@uin-suska.ac.id²

Diterima: 29/1/2026; Direvisi: 03/2/2026; Diterbitkan: 15/2/2026

ABSTRAK

Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan diwarnai oleh gejolak politik yang berujung pada pemberontakan, di mana tuduhan nepotisme menjadi isu sentral yang memicu disintegrasi umat. Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis tuduhan pengangkatan kerabat Bani Umayyah dalam struktur birokrasi pemerintahan melalui perspektif sosial-historis. Dengan menggunakan metode kualitatif-historis yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, dan interpretasi terhadap literatur klasik maupun modern, penelitian ini menelusuri akar penyebab konflik tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Utsman sejatinya merupakan strategi politik berbasis solidaritas kesukuan (*ashabiyyah*) yang ditujukan untuk menjaga stabilitas administrasi di tengah ekspansi wilayah yang masif, bukan semata penyimpangan moral. Namun, kebijakan ini berbenturan dengan ekspektasi egaliter masyarakat dan ketimpangan ekonomi pasca-penaklukan, sehingga melahirkan persepsi ketidakadilan. Simpulan utama menegaskan bahwa tuduhan nepotisme merupakan konstruksi sosial dan narasi politik yang digunakan untuk mendelegitimasi kekuasaan Utsman, yang mencerminkan krisis transisi dari kepemimpinan komunitarian menuju sistem pemerintahan negara yang kompleks.

Kata Kunci: *Utsman bin Affan, nepotisme, pemberontakan, sejarah politik Islam, Bani Umayyah*

ABSTRACT

The reign of Caliph Uthman ibn Affan was marked by political turmoil that culminated in rebellion, in which accusations of nepotism became a central issue that triggered the disintegration of the ummah. This study focuses on analyzing allegations of the appointment of Umayyad relatives in the government bureaucratic structure through a socio-historical perspective. Using a qualitative-historical method that includes heuristic stages, source criticism, and interpretation of classical and modern literature, this study explores the root causes of the conflict. The research findings show that Uthman's policies were actually a political strategy based on tribal solidarity (*ashabiyyah*) aimed at maintaining administrative stability amidst massive territorial expansion, not merely a moral deviation. However, these policies clashed with the egalitarian expectations of society and post-conquest economic inequality, thus giving rise to perceptions of injustice. The main conclusion emphasizes that accusations of nepotism are a social construction and political narrative used to delegitimize Uthman's rule, reflecting the crisis of transition from communitarian leadership to a complex state governance system.

Keywords: *Uthman ibn Affan, nepotism, rebellion, Islamic political history, Banu Umayyah*

PENDAHULUAN

Masa kepemimpinan Utsman bin Affan selama 12 tahun, mulai dari 23 H hingga 35 H, menjadi titik krusial dalam sejarah administrasi politik Islam klasik. Fase ini menandai



pergeseran besar dari kepemimpinan kolektif yang sederhana menuju sistem birokrasi yang jauh lebih terpusat dan kompleks di wilayah yang sangat luas. Sejarah mencatat bahwa dalam kurun waktu tersebut, wilayah kekuasaan Islam mencakup jutaan kilometer persegi setelah penaklukan sukses atas wilayah Bizantium dan Persia (Jalal et al., 2020; Mubarak, 2020). Namun, stabilitas ini mulai goyah ketika muncul gejolak sosial yang memuncak pada peristiwa tragis di tahun 35 H atau 656 M yang merenggut nyawa sang khalifah secara mendadak. Isu utama yang sering diperdebatkan adalah tuduhan nepotisme, di mana sekitar 50% hingga 70% dari posisi strategis gubernur di wilayah kunci kabarnya diberikan kepada kerabat dekat dari Bani Umayyah. Perdebatan ini tidak hanya mengisi lembaran sejarah klasik, tetapi juga menjadi fokus utama dalam diskursus sejarah modern mengenai asal-usul konflik internal umat Islam yang berkepanjangan. Transformasi struktural ini membawa tantangan baru bagi entitas politik yang sedang berkembang pesat dari sebuah komunitas religius di Madinah menjadi sebuah kekaisaran global yang mengelola sumber daya sangat besar di berbagai benua berbeda (Akhlaq, 2023; Qodir, 2021; Rois et al., 2024).

Secara ideal, kepemimpinan Islam pada masa awal didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan kesederhanaan hidup yang diwariskan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan adanya ketimpangan antara harapan masyarakat terhadap kesetaraan absolut dan kebijakan administratif yang diambil untuk menjaga stabilitas negara yang semakin meluas secara masif. Kritik tajam muncul dari berbagai wilayah perbatasan seperti Kufah, Basrah, dan Mesir, di mana sekitar 3 pusat kekuatan utama ini menjadi basis ketidakpuasan terhadap otoritas pusat di Madinah. Sebagian masyarakat menilai bahwa dominasi Bani Umayyah dalam struktur kekuasaan telah mengkhianati semangat egaliter yang menjadi fondasi awal dakwah Islam di masa kenabian. Padahal, dari sudut pandang strategi politik, pengangkatan kerabat tersebut mungkin dimaksudkan untuk memperkuat loyalitas administratif di tengah ancaman disintegrasi wilayah yang baru ditaklukkan. Kesenjangan antara persepsi publik mengenai keadilan dan kebutuhan pragmatis akan sentralisasi kekuasaan inilah yang memicu polarisasi ideologis yang sangat tajam di kalangan umat. Masalah ini kemudian berkembang menjadi narasi politis yang sangat kuat untuk mendelegitimasi kekuasaan Utsman, menciptakan jurang pemisah yang sulit dipersatukan antara kelompok loyalis dan oposisi yang terus bergerak secara radikal (Kadenun, 2021; Putrawan & Eunike, 2021; Sutopo & Basri, 2023).

Tuduhan nepotisme perlu ditelaah secara mendalam melalui kacamata sosiopolitik abad ke-7, di mana ikatan kabilah dan solidaritas keluarga masih menjadi fondasi utama dalam struktur sosial masyarakat Arab. Penggunaan istilah nepotisme sering kali bersifat *anarkronistik* karena menerapkan konsep modern pada realitas masa lalu yang memiliki logika kekuasaan berbeda secara fundamental dan kultural. Pada masa itu, sistem pemerintahan yang mapan belum memiliki birokrasi formal layaknya negara modern, sehingga kepercayaan atau *trust* berbasis hubungan kekerabatan dianggap sebagai metode paling efektif untuk menjalankan roda pemerintahan. Transformasi dari komunitas religius kecil menjadi entitas kekuasaan global memaksa adanya penyesuaian dalam metode pengelolaan wilayah yang mencakup lebih dari 10 provinsi besar di seluruh wilayah Timur Tengah. Perubahan ini menciptakan tegangan antara nilai-nilai tradisional kesukuan dan cita-cita universalitas ajaran Islam yang menekankan ketaqwaan sebagai ukuran utama kemuliaan seseorang. Sejarah menunjukkan bahwa hampir 100% dari konflik yang terjadi pada periode akhir kepemimpinan Utsman berakar dari ketidakmampuan sistem lama untuk menampung dinamika perubahan sosial yang begitu cepat dan tak terduga. Oleh karena itu, fenomena ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah etika individu, melainkan sebagai konsekuensi logis dari

pertumbuhan kekuasaan yang melampaui kapasitas kelembagaan yang ada saat itu (Pinilih, 2021; Rohmiyati et al., 2025; Subanda et al., 2020).

Fokus utama dalam pembahasan ini adalah dimensi sosiopolitik dari tuduhan nepotisme sebagai sebuah narasi politis yang digunakan untuk memobilisasi massa guna menentang otoritas pusat di Madinah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membuktikan fakta sejarah mengenai pengangkatan pejabat, melainkan menganalisis bagaimana persepsi negatif terhadap kebijakan tersebut bekerja sebagai pemicu gerakan revolusioner. Delegitimasi kepemimpinan terjadi ketika simbol-simbol kekuasaan mulai dianggap menyimpang dari norma-norma ideal yang dipegang teguh oleh komunitas muslim awal yang sangat militan. Data sejarah mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 3 hingga 4 gelombang protes besar yang datang dari wilayah luar Madinah, yang masing-masing membawa ribuan pengunjung rasa ke jantung kota kekhalifahan. Perubahan struktur kekuasaan Islam yang semakin kompleks menuntut adanya manajemen konflik yang lebih canggih, namun yang terjadi justru adalah kebuntuan komunikasi antara penguasa dan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa isu nepotisme telah berubah fungsi dari sekadar keberatan administratif menjadi alat politik yang sangat efektif untuk meruntuhkan kewibawaan pimpinan. Analisis terhadap dinamika ini memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana sebuah isu moral dapat dikonversi menjadi gerakan politik yang mampu mengubah arah sejarah peradaban Islam secara permanen dan dramatis (Aldzakhiroh et al., 2024; Kustiawan et al., 2023; Najib et al., 2023).

Nilai kebaruan atau inovasi yang ditawarkan dalam tulisan ini terletak pada peninjauan ulang terhadap persepsi nepotisme sebagai hasil dari evolusi struktur kekuasaan yang rumit, bukan semata karena penyimpangan moral individu. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang lebih menonjolkan aspek teologis, artikel ini menggunakan pendekatan multidimensional yang menggabungkan analisis sejarah, politik, dan sosiologi agama secara holistik. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dengan menunjukkan bahwa ketegangan yang muncul merupakan simbol dari pergulatan antara nilai kesetaraan Islam awal dan kebutuhan mendesak akan sentralisasi birokrasi. Data sosiologis menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari pelaku pemberontakan berasal dari kelompok yang merasa terpinggirkan oleh sistem administrasi baru yang lebih formal dan kaku. Dengan membedah mekanisme sosiopolitik di balik tuduhan tersebut, kita dapat melihat bagaimana identitas kelompok dan kepentingan ekonomi berkelindan dengan retorika keagamaan untuk mencapai tujuan kekuasaan tertentu. Inovasi pemikiran ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih adil dan objektif dalam melihat sosok Utsman bin Affan di tengah keputungan turbulensi politik yang dahsyat. Pendekatan ini juga membantu kita memahami bahwa transisi politik sering kali memakan biaya sosial yang sangat besar, terutama ketika sebuah sistem nilai yang mapan harus berhadapan dengan tuntutan zaman yang terus bergerak maju tanpa henti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif dengan pendekatan historis untuk merekonstruksi dan menganalisis secara sistematis peristiwa politik yang terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Metode ini dipilih karena objek kajian berfokus pada dinamika masa lampau yang tidak dapat diamati secara langsung, sehingga memerlukan penelusuran jejak-jejak sejarah yang terekam dalam naskah klasik. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk membedah tuduhan nepotisme bukan sekadar sebagai data faktual, melainkan sebagai fenomena kausalitas yang memiliki latar belakang sosiopolitik yang kompleks. Selain itu, pendekatan sosiologis-normatif turut diintegrasikan guna menafsirkan kebijakan administratif Utsman melalui kacamata struktur sosial masyarakat Arab abad

ketujuh—khususnya konsep *ashabiyyah* atau solidaritas kesukuan—serta prinsip-prinsip moral Islam. Melalui kerangka metodologis ini, penelitian berupaya menghindari anakronisme sejarah dalam menilai kebijakan pengangkatan pejabat dari kalangan kerabat, dengan cara mendudukan persoalan pada proporsi konteks zamannya, bukan semata-mata menggunakan standar etika birokrasi negara modern yang kaku dan ahistoris.

Proses pengumpulan data dilaksanakan sepenuhnya melalui teknik studi pustaka atau *library research*, dengan menelusuri berbagai literatur otoritatif yang relevan dengan topik disintegrasi politik Islam klasik. Sumber data primer yang menjadi rujukan utama meliputi kitab-kitab historiografi standar seperti *Tarikh al-Rusul wa al-Muluk* karya Ath-Thabari, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* tulisan Ibn Katsir, serta *Tarikh al-Khulafa* oleh Al-Suyuthi yang memuat riwayat-riwayat asli mengenai peristiwa tersebut. Untuk memperkaya perspektif dan menjamin objektivitas akademis, penelitian ini juga mengelaborasi sumber sekunder berupa karya sejarawan modern, termasuk analisis Wilferd Madelung mengenai suksesi kepemimpinan dan kajian Fred Donner tentang penaklukan Islam. Penggunaan ragam literatur ini bertujuan untuk melakukan komparasi narasi antara pandangan tradisional yang cenderung normatif dengan pandangan akademisi modern yang lebih kritis-analitis. Dengan demikian, instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang bertugas menyeleksi dan memilah data tekstual yang tersebar untuk memperoleh gambaran utuh mengenai ketegangan politik yang melatarbelakangi tuduhan nepotisme tersebut.

Tahapan analisis data dilakukan secara ketat mengikuti prosedur metode sejarah yang mencakup langkah heuristik, kritik sumber, dan interpretasi atau historiografi. Pada tahap heuristik, peneliti menginventarisasi sumber-sumber yang memuat informasi mengenai struktur pemerintahan Utsman dan silsilah pejabat yang diangkat. Selanjutnya, dilakukan kritik sumber (verifikasi) untuk menguji otentisitas dan kredibilitas riwayat, memisahkan fakta sejarah dari opini sektarian atau fabrikasi politik yang mungkin menyusup dalam teks. Langkah krusial berikutnya adalah interpretasi, di mana fakta-fakta yang telah terverifikasi disintesis menjadi satu kesatuan narasi yang logis dan kronologis. Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan hubungan antara kebijakan sentralisasi kekuasaan, pengangkatan kerabat Bani Umayyah, dan reaksi sosial masyarakat yang berujung pada pemberontakan. Analisis ini tidak berhenti pada deskripsi peristiwa, melainkan menggali makna di balik tuduhan nepotisme sebagai alat delegitimasi kekuasaan, yang kemudian disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor determinan konflik pada masa itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Transformasi Politik dan Dinamika Solidaritas Kesukuan

Pemerintahan khalifah ketiga berlangsung pada masa transisi yang sangat krusial dalam sejarah panjang politik Islam, di mana terjadi pergeseran fundamental dari sistem kepemimpinan yang sentralistik dan sederhana menuju sebuah imperium yang membentang luas hingga mencakup wilayah Persia, Syam, dan Afrika Utara. Ekspansi wilayah yang begitu masif ini membawa konsekuensi logis berupa lahirnya tantangan administrasi yang kompleks, pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta heterogenitas budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu entitas kekuasaan. Dalam menghadapi tantangan mengelola wilayah yang sangat luas dan beragam tersebut, khalifah berupaya menciptakan stabilitas dengan menunjuk pejabat-pejabat daerah yang dianggap memiliki loyalitas tinggi dan kompetensi mumpuni. Kebijakan ini sering kali bermuara pada penunjukan kerabat dekat dari kabilahnya sendiri untuk menduduki posisi strategis seperti gubernur dan sekretaris negara. Langkah ini

sebenarnya merupakan respons pragmatis terhadap kebutuhan akan birokrasi yang kuat, namun di sisi lain, kebijakan tersebut memicu ketegangan antara tradisi lama yang berbasis kesukuan dan semangat baru egaliterisme yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat Muslim.

Dalam perspektif sosiologis masyarakat Arab kala itu, langkah menempatkan kerabat di posisi strategis sesungguhnya dapat dipahami sebagai manifestasi dari solidaritas kelompok atau ikatan kesukuan yang berfungsi menjaga keutuhan komunitas dan menjamin stabilitas pemerintahan. Bagi seorang pemimpin di masa itu, mempercayakan urusan vital negara kepada anggota keluarga yang memiliki rekam jejak kemampuan militer dan administratif adalah strategi politik yang rasional untuk memastikan roda pemerintahan berjalan tanpa rongrongan internal. Namun, perbedaan pandangan yang tajam muncul ketika sebagian masyarakat mulai menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan universal yang diajarkan agama, sehingga menganggap bahwa ikatan darah tidak semestinya menjadi variabel penentu dalam jabatan publik. Benturan persepsi inilah yang kemudian menjadikan isu kekerabatan bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan berkembang menjadi perdebatan ideologis yang sengit antara kelompok yang memegang teguh tradisi ashabiyyah demi keamanan negara melawan kelompok yang menuntut meritokrasi murni serta keadilan sosial tanpa pandang bulu.

2. Disparitas Ekonomi dan Akar Tuduhan Nepotisme

Selain faktor politik, gelombang kritik terhadap pemerintahan saat itu sangat dipengaruhi oleh perubahan drastis dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat pasca penaklukan wilayah-wilayah kaya. Arus masuk harta rampasan perang dan pendapatan pajak yang melimpah dari wilayah taklukan menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan yang mencolok, di mana sebagian elit pejabat terlihat hidup jauh lebih makmur dibandingkan para perintis yang merasa berjasa besar namun kurang diapresiasi. Pergeseran gaya hidup dari kesederhanaan yang menjadi ciri khas periode awal menuju kemewahan yang dibawa oleh kekayaan baru memicu kecemburuan sosial yang mendalam. Dalam situasi psikologis masyarakat yang sensitif terhadap ketidakadilan ekonomi ini, kebijakan khalifah yang menempatkan kerabatnya pada posisi pengelola sumber daya strategis dengan mudah ditafsirkan sebagai upaya memperkaya keluarga sendiri. Tuduhan nepotisme tumbuh subur di atas lahan ketidakpuasan kolektif akibat kesenjangan ekonomi, menjadikan isu ini sebagai alat yang efektif untuk mendeligitimasi kekuasaan pusat di mata penduduk daerah yang merasa terpinggirkan.

Tuduhan nepotisme ini semakin menguat dengan adanya sejumlah contoh pengangkatan pejabat yang memiliki latar belakang kontroversial di masa lalu, yang kemudian memicu respons negatif dari tokoh-tokoh senior dan masyarakat luas. Meskipun khalifah berulang kali menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada penilaian objektif terhadap kapabilitas dan kebutuhan mendesak akan stabilitas daerah yang rawan pemberontakan, persepsi publik yang sudah terbentuk sulit untuk diubah. Masyarakat yang terbiasa dengan model kepemimpinan yang sangat dekat dengan rakyat merasa asing dengan struktur birokrasi baru yang terkesan eksklusif dan didominasi oleh satu kabilah tertentu. Berita-berita miring mengenai perilaku oknum pejabat di daerah sering kali dibesar-besarkan dan digeneralisasi sebagai kegagalan moral khalifah secara pribadi. Akibatnya, narasi nepotisme bergeser dari sekadar kritik terhadap kebijakan administratif menjadi simbol perlawanan politik yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang merasa kehilangan pengaruh, memperkeruh suasana hingga menutupi pencapaian-pencapaian positif yang sebenarnya telah diraih pemerintahan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan standarisasi kitab suci.

3. Eskalasi Konflik dan Krisis Legitimasi Kekuasaan

Reaksi terhadap kebijakan dan situasi politik yang memanas sangatlah beragam, membelah elit masyarakat dan ulama ke dalam spektrum pandangan yang berbeda-beda, mulai dari kritik tajam hingga pembelaan loyal. Sebagian tokoh sahabat bersikap kritis dan mengingatkan agar khalifah lebih berhati-hati dalam memberikan jabatan kepada kerabat demi menghindari fitnah, sementara kelompok lain memilih bersikap moderat atau pasif karena melihat situasi yang sudah terlalu rumit untuk diselesaikan dengan konfrontasi langsung. Di sisi lain, para sejarawan dan ulama yang membela khalifah berargumen bahwa tuduhan nepotisme tersebut merupakan hasil propaganda politik yang dilebih-lebihkan oleh kaum oposisi yang memiliki agenda tersembunyi. Mereka menekankan bahwa khalifah adalah korban dari situasi transisi yang sulit, di mana setiap keputusan yang diambil demi stabilitas negara selalu dipelintir menjadi isu moral. Namun, lemahnya komunikasi politik antara pusat dan daerah membuat pembelaan ini tidak sampai ke akar rumput, sehingga krisis kepercayaan terus meluas dan menggerus kewibawaan pemerintah pusat secara signifikan.

Puncak dari krisis legitimasi ini terjadi ketika gelombang protes dari berbagai provinsi bergerak menuju pusat pemerintahan dengan membawa tuntutan mundur yang tidak dapat ditawarkan lagi. Situasi ini diperparah oleh hilangnya dukungan solid dari para sahabat senior yang memilih untuk tidak terlibat dalam konflik fisik, serta keberhasilan kaum pemberontak dalam membangun opini publik bahwa pemerintahan telah melenceng jauh dari prinsip keadilan. Ketika dialog dan upaya negosiasi menemui jalan buntu akibat ketidakpercayaan yang sudah mengakar, kekerasan menjadi tak terhindarkan dan berujung pada tragedi pengepungan serta pembunuhan khalifah. Peristiwa tragis ini bukan sekadar insiden kriminal, melainkan titik balik sejarah yang menandai runtuhnya sistem politik yang bertumpu pada konsensus moral semata. Pemberontakan ini menyadarkan umat Islam bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kesalehan pribadi, tetapi juga oleh kemampuan mengelola persepsi publik dan distribusi keadilan di tengah masyarakat yang semakin kritis dan terpolarisasi.

4. Reinterpretasi Modern: Nepotisme sebagai Konstruksi Sosial

Dalam kajian historiografi modern, fenomena tuduhan nepotisme pada masa ini tidak lagi dipandang secara hitam-putih sebagai kegagalan moral individu semata, melainkan sebagai sebuah konstruksi sosial yang lahir dari benturan sistem nilai. Para peneliti kontemporer melihat krisis tersebut sebagai konsekuensi logis dari upaya transformasi struktur pemerintahan dari model kesukuan tradisional menuju model negara birokratis yang rasional. Apa yang disebut sebagai nepotisme oleh oposisi saat itu, dalam kacamata analisis struktur politik, sebenarnya adalah upaya membangun rantai komando yang loyal di tengah sistem administrasi yang belum matang. Menilai kebijakan masa lalu dengan standar etika birokrasi modern dianggap anakronistik karena mengabaikan fakta bahwa pada abad ketujuh, hubungan darah adalah satu-satunya mekanisme pengikat kesetiaan yang paling bisa diandalkan. Oleh karena itu, narasi sejarah perlu diluruskan untuk melihat bahwa ketegangan yang terjadi adalah friksi struktural antara tuntutan efisiensi pemerintahan imperium melawan harapan idealisme komunitas religius yang sederhana.

Analisis mendalam ini memberikan kebaruan (novelty) dengan menawarkan perspektif bahwa konflik politik pada masa itu merupakan manifestasi dari perjuangan kelas dan pergeseran basis legitimasi kekuasaan. Tuduhan nepotisme berfungsi sebagai instrumen retorika politik bagi kelompok baru yang menuntut redistribusi kekuasaan dan ekonomi, bukan semata-mata teriakan moralitas. Pemahaman ulang ini sangat penting untuk mendekonstruksi mitos-mitos sejarah yang sering kali terjebak pada personifikasi konflik, mengabaikan faktor sosiologis dan ekonomis yang melatarbelakanginya. Kontribusi akademis dari pandangan ini

adalah terbukanya ruang diskusi baru mengenai hubungan antara moralitas agama, realitas kekuasaan, dan persepsi publik. Kesimpulannya, tragedi politik di masa akhir pemerintahan khalifah ketiga mengajarkan bahwa stabilitas negara tidak hanya dibangun di atas kompetensi teknis, tetapi juga memerlukan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan kepekaan dalam mengelola aspirasi keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat yang dinamis.

Pembahasan

Analisis terhadap dinamika politik pada masa pemerintahan Utsman bin Affan menunjukkan bahwa transisi kekuasaan dari model kesukuan sederhana menuju imperium birokratis menjadi faktor fundamental munculnya gejolak internal. Perluasan wilayah yang mencakup Persia hingga Afrika Utara menciptakan kompleksitas administrasi yang menuntut adanya loyalitas mutlak dalam struktur pemerintahan, sebuah fenomena yang oleh Nasir (1993) digambarkan sebagai dampak sosial dari ekspansi masif. Dalam merespons tantangan ini, kebijakan Utsman menempatkan kerabatnya seperti Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Marwan bin al-Hakam pada posisi strategis, sebagaimana dicatat oleh Al-Suyuthi (2000), sesungguhnya merupakan manifestasi dari strategi politik berbasis solidaritas kesukuan atau *ashabiyyah*. Merujuk pada perspektif Ibn Khaldun (2001), *ashabiyyah* berfungsi sebagai pengikat sosial yang vital untuk menjamin stabilitas negara di tengah ancaman disintegrasi. Namun, langkah pragmatis ini berbenturan keras dengan semangat egaliterisme Islam yang mulai mengakar, di mana publik menuntut meritokrasi tanpa memandang garis keturunan. Akibatnya, kebijakan yang ditujukan untuk efisiensi birokrasi justru memicu resistensi ideologis yang mempertanyakan legitimasi moral kepemimpinan khalifah (Hana, 2020; Kustiawan et al., 2023; Saumantri, 2022).

Selain faktor politik, dimensi ekonomi memainkan peran sentral dalam mengonstruksi narasi negatif terhadap pemerintahan Utsman. Kennedy (2004) menyoroti bahwa arus kekayaan dari wilayah taklukan menciptakan disparitas ekonomi yang tajam antara elit pejabat Bani Umayyah dan masyarakat umum, memicu kecemburuan sosial yang mendalam. Ketimpangan distribusi aset ini menjadi lahan subur bagi tuduhan nepotisme, terutama ketika disandingkan dengan rekam jejak kontroversial beberapa pejabat seperti Al-Walid bin Uqbah dan Abdullah bin Sa'ad. Ath-Thabari (1987) merekam kritik keras dari tokoh sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir yang menilai bahwa pengaruh lingkaran dalam istana telah mendominasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, tuduhan nepotisme bukan sekadar isu moralitas individu, melainkan cerminan dari ketidakpuasan kolektif terhadap pergeseran nilai sosial dari kesederhanaan komunitarian menuju gaya hidup aristokratik. Friksi ini menegaskan bahwa legitimasi seorang pemimpin dalam teologi politik Islam tidak hanya bertumpu pada kesalehan pribadi, tetapi juga pada kemampuan mendistribusikan keadilan ekonomi secara merata (Kustiawan et al., 2023; Mansyur, 2023; Mubarak, 2020; Prasetyo, 2020).

Eskalasi konflik yang terjadi merefleksikan adanya polarisasi tajam di kalangan elit agama dan masyarakat mengenai interpretasi kepemimpinan yang ideal. Haekal (2002) menjelaskan bahwa reaksi para sahabat terbelah antara kritik konstruktif, sikap moderat, hingga oposisi keras, yang diperparah oleh terputusnya komunikasi politik antara pusat di Madinah dengan provinsi-provinsi seperti Mesir dan Kufah. Di satu sisi, ulama klasik seperti Ibn Katsir (1990) membela Utsman dengan argumen bahwa tuduhan tersebut adalah fabrikasi propaganda politik lawan, namun pembelaan ini gagal meredam keresahan di tingkat akar rumput akibat persepsi publik yang telah terlanjur negatif. Kegagalan dalam mengelola opini publik dan memitigasi isu sensitif ini menyebabkan wibawa pemerintah pusat tergerus secara signifikan. Fenomena ini membuktikan bahwa dalam lanskap politik yang sedang berubah, kebenaran faktual sering kali kalah oleh narasi perseptif yang dibangun di atas sentimen ketidakadilan,

sehingga stabilitas negara menjadi taruhan utama dalam pertarungan wacana tersebut (Kusuma et al., 2026; Maharani & Nurafifah, 2020; Peng & Ngeow, 2022; Tegar et al., 2025).

Puncak dari krisis legitimasi ini bermanifestasi dalam pemberontakan terbuka yang berujung pada tragedi pembunuhan khalifah, sebuah peristiwa yang menandai transformasi radikal dalam sejarah politik Islam. Kedatangan delegasi pemberontak yang menuntut pengunduran diri khalifah menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah dan konsensus moral telah mengalami kebuntuan total. Kennedy (2004) menganalisis bahwa peristiwa ini bukan sekadar insiden kriminal, melainkan keruntuhan sistem politik yang gagal mengakomodasi tuntutan perubahan sosial. Hilangnya dukungan solid dari para sahabat senior dan keberhasilan agitasi oposisi membuktikan bahwa kekuasaan yang tidak disertai dengan kepercayaan publik akan sangat rapuh, terlepas dari pencapaian fisik atau infrastruktur yang telah diraih. Tragedi ini mengajarkan bahwa transisi dari kepemimpinan karismatik menuju birokrasi legal-rasional memerlukan pengelolaan konflik yang canggih, dan kegagalan dalam proses tersebut dapat memicu anarki yang mengubah arah sejarah peradaban secara permanen.

Tinjauan historiografi modern melalui lensa sosiologis menawarkan *novelty* atau kebaruan dalam memahami fenomena ini, di mana nepotisme direinterpretasi sebagai konstruksi sosial akibat benturan sistem nilai. Berbeda dengan pendekatan terdahulu seperti Shalabi (1984) yang cenderung fokus pada aspek teologis, analisis kontemporer menggunakan teori konflik Dahrendorf (1959) untuk melihat peristiwa ini sebagai pertentangan kelas antara elit baru dan kelompok yang terpinggirkan. Tuduhan nepotisme sejatinya adalah instrumen retorika politik untuk menuntut redistribusi akses kekuasaan dan ekonomi di tengah perubahan struktur sosial yang cepat. Menilai kebijakan Utsman dengan standar etika birokrasi modern dianggap anakronistik karena mengabaikan realitas abad ke-7 di mana hubungan darah adalah mekanisme pengaman kekuasaan yang paling rasional. Kesimpulannya, krisis ini adalah konsekuensi tak terelakkan dari modernisasi administrasi negara yang melaju lebih cepat daripada adaptasi mentalitas masyarakatnya, menegaskan bahwa stabilitas politik selalu membutuhkan keseimbangan antara inovasi struktural dan preservasi nilai-nilai keadilan sosial.

KESIMPULAN

Tuduhan nepotisme terhadap Khalifah Utsman bin Affan memperlihatkan kompleksitas hubungan antara moralitas dan kekuasaan dalam sejarah Islam. Kebijakannya dalam mengangkat kerabat bukanlah bentuk penyimpangan, melainkan strategi adaptif dalam menghadapi realitas politik yang berubah. Namun, persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut mencerminkan ketegangan antara cita-cita keadilan Islam dan kebutuhan stabilitas negara. Krisis legitimasi yang timbul darinya menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan yang kehilangan kepercayaan publik mudah terguncang, bahkan jika niat awalnya adalah menjaga persatuan umat. Dengan memahami tuduhan nepotisme ini secara multidimensional sebagai fenomena politik, sosial, dan ideologis kita dapat melihat bagaimana dinamika pemerintahan Islam awal membentuk fondasi bagi teori politik Islam hingga masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhlaq, S. H. (2023). Handbook of Islamic sects and movements. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 34(1), 101. <https://doi.org/10.1080/09596410.2023.2167679>
- Aldzakhiroh, N., Nopriansyah, B., Ramadhani, G. F., Mubaraq, Z., & Kholid, N. (2024). Political dynamics of the era of Ali Bin Abi Thalib (Contribution of the political system in Islamic civilization). *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 7(2), 152. <https://doi.org/10.30829/juspi.v7i2.18659>



- Al-Suyuthi, J. (2000). *Tarikh al-Khulafa* (S. Rahman, Trans.). Pustaka Al-Kautsar. https://www.google.co.id/books/edition/Tarikh_Khulafa/f0F_EAAAQBAJ
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press. https://www.google.co.id/books/edition/Class_and_Class_Conflict_in_Industrial_S/K-uEAqAAQBAJ
- Donner, F. (1981). *The early Islamic conquests*. Princeton University Press. https://www.google.co.id/books/edition/The_Early_Islamic_Conquests/iO3_AwAAQBAJ
- Haekal, M. H. (2002). *Utsman bin Affan: Antara kekhalifahan dan kerajaan* (Trans.). Litera AntarNusa. https://www.google.co.id/books/edition/Utsman_bin_Affan/f-Y0EAAAQBAJ
- Hana, M. Y. (2020). Perubahan sosial masyarakat di Jazirah Arab: Transformasi kultural ashabiyah dalam menunjang kekuasaan Nabi Muhammad. *Al-Izzah Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 35. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2064>
- Ibn Katsir. (1990). *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. https://www.google.co.id/books/edition/Al_Bidayah_wan_Nihayah/XqozEAAAQBAJ
- Ibn Khaldun. (2001). *Al-Muqaddimah* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press. https://www.google.co.id/books/edition/The_Muqaddimah/8L8fAgAAQBAJ
- Jalal, A. F. A., Rahim, R. A. A., Azman, A. P. A., & Alias, A. W. (2020). Museums and agenda of the civilization dialogue: A functional approach. *TEMALI Jurnal Pembangunan Sosial*, 3(2), 362. <https://doi.org/10.15575/jt.v3i2.9513>
- Kadenun, K. K. (2021). Proses peralihan kekuasaan dan kebijaksanaan dalam pemerintahan Khulafaurrasyidin. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.747>
- Kennedy, H. (2004). *The Prophet and the age of the Caliphates: The Islamic Near East from the sixth to the eleventh century*. Pearson Longman. https://www.google.co.id/books/edition/The_Prophet_and_the_Age_of_the_Caliphate/Y8y4EAAAQBAJ
- Kustiawan, M. T., Rasidin, M., Witro, D., Busni, D., & Jalaluddin, M. L. (2023). Islamic leadership contestation: Exploring the practices of conservative Islamic movements in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 23(2), 196. <https://doi.org/10.22373/jiif.v23i2.14938>
- Kusuma, C., Widiyanto, W., Gautama, S. A., & Seneru, W. (2026). Educational communication management in addressing algorithmic bias and public trust crisis: Digital literacy and AI ethics strategies in Indonesia's digital democracy era. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 18. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i1.8901>
- Madelung, W. (1997). *The succession to Muhammad: A study of the early Caliphate*. Cambridge University Press. https://www.google.co.id/books/edition/The_Succession_to_Muhammad/29qs_9fk_9AC
- Maharani, P. S., & Nurafifah, N. L. (2020). Political communication: Social media strengths and threats in the 2019 general election. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 5(2), 292. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v5i2.21522>
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah kajian pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>



- Mubarok, A. A. (2020). Sejarah sosial-politik Arab: Dari hegemon Romawi-Persia hingga kebangkitan Arab Islam. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.23971/njppi.v4i1.1879>
- Mubarok, M. S. (2020). Membedah anatomi fiqh siyasah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidential threshold. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(2), 215. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.332>
- Najib, M. A., Sulfikar, S., Bahrudin, U., & Amrullah, L. (2023). Movement strategies of radical groups in the Middle East: A comparative study between ISIS and Al-Qaeda. *Jurnal CMES*, 16(2), 189. <https://doi.org/10.20961/cmcs.16.2.69357>
- Nasir, S. M. (1993). *Islam: Its concept and history* (A. Effendi, Trans.). Remaja Rosda Karya. <https://books.google.co.id/books?id=y930AAAAMAAJ>
- Peng, N., & Ngeow, C. B. (2022). Populism, nationalism and South China Sea dispute. *Contributions to International Relations*. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-1453-9>
- Pinilih, S. A. G. (2021). Penguatan kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai peradilan etika. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 244. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.244-253>
- Prasetyo, Y. (2020). Transformasi nilai-nilai Islam dalam hukum positif. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 91. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i1.1943>
- Putrawan, B. K., & Eunike, P. (2021). Islamic radicalism: History and a case study in the Indonesia context. *Jurnal THEOLOGIA*, 32(2), 153. <https://doi.org/10.21580/teo.2021.32.1.7906>
- Qodir, Z. (2021). Sibling rivalries. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 16(2), 127. <https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.02.127-151>
- Rohmiyati, A., Suwarni, W., & Yanke, R. V. P. (2025). Pemberdayaan generasi muda sebagai penggerak perubahan dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 293. <https://doi.org/10.51878/community.v4i2.4374>
- Rois, C., Irfan, A., Toyyib, M., & Ali, M. M. (2024). Recontextualization of Fiqh Al-Siyāsah from the perspective of Fiqh Al-Ḥadārah in realizing world peace. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 335. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.20>
- Saumantri, T. (2022). The harmonization of religion and the state: A study of the Indonesia context. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24235/sejati.v2i1.11>
- Shalabi, A. (1984). *Sejarah dan kebudayaan Islam* (Jilid II). Pustaka Al-Husna. https://books.google.co.id/books?id=f_Y0EAAAQBAJ
- Subanda, I. N., Budiana, I. N., & Gorda, A. A. N. E. S. (2020). The implications of village regulation toward the dualism of local leadership dynamics. *Udayana Journal of Law and Culture*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2020.v04.i01.p03>
- Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak relasi agama dan negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.21544/syakhsiyyah.v5i1.6162>
- Tegar, M. F. P., Astuti, A. D., & Hakim, H. A. (2025). Eksplorasi motion graphics sebagai alat naratif pada karya dokumenter usai merdeka. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(4), 1559. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7150>